



# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Teuku Surya Darma  
Indah Pranchiska  
Hamam Wuryantina

## Efektivitas Kebijakan Distribusi BBM Melalui Aplikasi MyPertamina

### Isu Strategis

Diketahui secara umum bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas strategis bagi masyarakat mulai dari rumah tangga, industri maupun layanan transportasi umum. Negara pun berkewajiban menyediakan BBM bagi masyarakat luas serta berkepentingan dalam menentukan harga maupun kelancaran pasokan melalui mekanisme distribusi BBM, karena sesungguhnya BBM memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi naik-turunnya harga-harga bahan pokok lainnya maupun tingkat inflasi.

Dengan itu, mengutip pandangan Tutuka Ariadi selaku pengamat perminyakan dari ITB yang dikutip dari laman <https://www.itb.ac.id/berita/detail/4495/tutuka-ariadi-distribusi-merupakan-permasalahan-utama-bbm-bersubsidi>, yang menjelaskan bahwa selain menahan laju inflasi dan angka kemiskinan serta terdapat keuntungan ekonomi lainnya, subsidi BBM yang dilakukan Negara juga memberi dampak negatif terhadap lambannya pengembangan energi alternatif yang kemudian menimbulkan ketergantungan pada energi BBM. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi juga berpotensi menghambat fokus pembangunan nasional pada sektor lainnya.

Perlunya subsidi BBM dilakukan Negara adalah dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga yang layak dan dapat mengurangi beban hidup masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi harga untuk 2 (*dua*) jenis (BBM), yakni Biosolar dan Pertalite sebagaimana telah diatur KEPMEN ESDM No.37.K/HK/02/MEM.M/2022 tertanggal 10 Maret 2022.

Disadari bahwa kebijakan subsidi BBM bagi warga negara telah juga berlaku di beberapa negara, bahkan dalam jumlah cukup besar. Sedangkan bagi Indonesia, dengan nilai realisasi subsidi mencapai Rp103,6 triliun atau setara USD6,9 miliar ditahun 2020, telah menempatkan Indonesia pada urutan keempat berdasarkan data *International Energy Agency (IEA)*.



Namun seiring penerapannya di Indonesia, muncul isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi perumus kebijakan subsidi BBM, di antaranya terkait ketepatan sasaran dan aspek keadilan, dimana siaran pers PT Pertamina (Persero) yang dikutip dari laman <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/subsidi-bbm-dinikmati-60-persen-orang-kaya-pertamina-upayakan-mekanisme-pendaftaran> menyebutkan bahwa mendekati 80% dari total jumlah konsumsi BBM bersubsidi (atau 33,3 liter/rumah tangga/bulan) yang dinikmati oleh 60% masyarakat tergolong mampu. Seirama dengan itu, BPH Migas juga melaporkan di tahun 2021 terkait salah sasaran BBM bersubsidi sekitar 9.000 Kiloliter (KL) dengan total nilai koreksi mencapai Rp85,82 miliar yang kemudian diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tidak diakui sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM Bersubsidi, melainkan menjadi jenis BBM umum (JBU) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/24/sekitar-9-ribu-kiloliter-bbm-subsidi-salah-sasaran-pada-2021>.

Isu terkait penyaluran BBM bersubsidi boleh dikatakan terus terjadi hampir setiap tahun, dimana Dewan Energi Nasional (DEN) menilai bahwa skema subsidi terbuka atas BBM berjenis Peralite maupun Solar yang berlaku selama ini rawan penyalahgunaan dan tidak tepat sasaran, sehingga dimungkinkan bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan subsidi tertutup terhadap distribusi kedua jenis BBM tersebut.

Hal ini menjadi penting, dimana Faisal Basri (2022) sebagaimana dikutip dari laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220629125627-4-351368/bbm-subsidi-dinikmati-si-kaya-jatah-orang-miskin-berkurang> mengingatkan karena pemerintah harus segera melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang harga jualnya saat ini jauh berada di bawah nilai keekonomian yang tentunya disertai dengan langkah pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial terhadap masyarakat kurang mampu. Bahkan Marwan Batubara selaku Direktur Eksekutif *Indonesian Resources Studie* (IRESS) menilai bahwa pola distribusi BBM saat ini melalui pendekatan subsidi harga, justru menimbulkan penambahan kuota solar yang ditetapkan Pemerintah menjadi 17 juta KL (dari 15 juta KL), dan kondisi serupa terjadi peningkatan kuota BBM penugasan (Peralite) dari 23 juta KL menjadi 28 juta KL sebagaimana dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2022/05/01/110230126/pengamat-nilai-subsidi-langsung-jadi-jalan-keluar-masalah-distribusi-bbm>.

Telah ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya atas alokasi anggaran subsidi harga BBM dalam bentuk undang-undang sehingga dalam penetapannya harga BBM bersubsidi relatif tidak terpengaruh oleh perkembangan harga minyak mentah dunia, tingkat konsumsi BBM bersubsidi dalam negeri maupun produksi minyak mentah Indonesia sebagaimana dikutip dari laman <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/119/74>. Sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah menetapkan penambahan alokasi belanja subsidi BBM di TA 2022 ini menjadi Rp401,8 triliun (bertambah subsidi Rp71,8 dan kompensasi BBM Rp234 triliun dari subsidi Rp77,5 triliun dan kompensasi BBM Rp18,5 triliun).

Dengan itu, PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang mendapat penugasan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan pelayanan distribusi BBM Bersubsidi, maka melalui aplikasi "MyPertamina" sebagai salah satu *tool* dalam pelaksanaan skema subsidi tertutup diharapkan mampu menysasar konsumen secara tepat sasaran sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Dalam hal ini tentunya Pemerintah mendorong pengendalian BBM subsidi agar pemberian subsidi tersebut benar-benar dinikmati oleh orang yang berhak dan menjaga sustainability dari ketahanan fiskal pemerintah.

Metode penyaluran berbasis teknologi informasi melalui aplikasi MyPertamina ini adalah pertama kali dijalankan PT Pertamina Patra Niaga sebagai *subholding Commercial & Trading* dengan mulai uji coba penerapan di 11 wilayah di lima provinsi di Indonesia sejak tanggal 1 Juli 2022. Untuk mendukung kebijakan tersebut tentunya Pertamina juga akan menyiapkan tempat atau pusat pendaftaran di sejumlah SPBU untuk mengakomodasi masyarakat yang

tidak memiliki akses internet dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), foto kendaraan dan dokumen pendukung lainnya.

Persoalannya, bagaimana layanan tersebut dapat menjangkau masyarakat, seiring fakta menunjukkan bahwa tidak seluruh konsumen dan SPBU di Indonesia, terutama pada daerah terpencil yang sulit dijangkau dan belum terhubung dengan jaringan internet. Padahal Pemerintah bertujuan agar BBM subsidi tersebut tepat sasaran, yaitu dapat diterima oleh yang berhak. Dengan perkataan lain, layanan tersebut secara tidak langsung berpotensi memunculkan ketidakadilan distributif, dikarenakan tidak adanya data pendukung yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat tertentu yang layak dan berhak menerima subsidi BBM telah didukung dengan telepon pintar yang *support* aplikasi MyPertamina tersebut. Sebaliknya, BBM Bersubsidi akan sangat mudah diakses kalangan tertentu dengan *device* yang mendukung.

### Saran Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan uraian permasalahan tersebut, maka sangatlah tepat ketika Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirut PT Pertamina tertanggal 06 Juli 2022 yang disampaikan melalui laman <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39715/t/Deddy+Sitorus%3A+Distribusi+BBM+Bersubsidi+Perlu+Sesuaikan+Situasi+dan+Kondisi+Setiap+Daerah>, menyarankan perlunya sosialisasi atau edukasi terkait dengan aplikasi MyPertamina terhadap masyarakat serta dinilai penting untuk melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar nantinya sosialisasi yang dilakukan bisa sampai dan diterima dengan baik hingga masyarakat di tingkat bawah. Selain itu, sistem yang nantinya akan digunakan distribusi BBM harus disesuaikan dengan kultur masing-masing daerah mengingat kondisi geografis dan kultural Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerah.

Sejatinya Pemerintah membuat kriteria yang lebih mudah dalam menentukan penerima BBM Bersubsidi, untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh pihak yang berhak, di antaranya mempertimbangkan kriteria kendaraan roda dua ataupun transportasi umum. Selain memastikan infrastruktur jaringan internet disetiap daerah, Pemerintah juga dapat mengalokasikan anggaran pembelian alat melalui skema dana *service obligation*, sehingga seluruh masyarakat yang pantas menerima BBM bersubsidi tidak merasa kesulitan dalam mengakses aplikasi MyPertamina.

Dengan rekomendasi itu semua, diharapkan efektivitas pelaksanaan distribusi BBM Bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dapat diwujudkan. Tentunya patut disadari dan menjadi hal yang tidak kalah penting adalah membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara *massif* untuk melakukan gerakan hemat energi, sehingga menghasilkan efisiensi yang berdampak pada berkurangnya beban keuangan negara.